

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logis sebagai berikut: 1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi, 2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran, 3) kekuasaan akan membangun bangunan atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi, dan 4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).¹³

Menurut Mubiyarto, pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan

¹³Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*. (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal.1-2

dan mendinamisasikan potensinya. Bertolak dari hal itu, tidak hanya ekonomi yang meningkat tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri.¹⁴

Menurut Adi, bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari tujuh tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

- a) Tahap persiapan, yaitu penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.
- b) Tahap assessment. Pada tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
- c) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang

¹⁴ Mubiyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT Dan Demokrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Adiyana Press, 1996), hal. 37

¹⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2002), hal. 56

dapat dilakukan.

- d) Tahap formulasi rencana aksi. Pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditunjukkan kepada pihak penyandang dana.
- e) Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat, karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng dan dilupakan.
- f) Tahap evaluasi. Pada tahap ini sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.
- g) Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi seharusnya dilakukan jika masyarakat sasaran sudah bisa mandiri, bukan

dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari empowerment, sedangkan memberdayakan adalah terjemahan dari kata empower. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata empower mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.¹⁶ Pokok pikiran mengenai pemberdayaan berkaitan dengan konsep kekuasaan, yang sering diartikan dengan kemampuan individu untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya, terlepas dari minat dan keinginan mereka.¹⁷

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang artinya kekuatan atau kemampuan, dari arti kata daya, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses menuju berdaya, atau proses untuk mendapatkan daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang

¹⁶ Muhammad Hasan dan Muhammad Aziz, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Makasar: CV.Nur Lina, 2018), hal. 155

¹⁷ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Persepektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 374

dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.¹⁸

Makna “memperoleh” daya/ kekuatan/ kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/ tidak adanya kekuatan/kemampuan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/ kemampuan/ kekuatan. Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan darimasyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/kemampuan/kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen

¹⁸ Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-model Pemberdayaan*. (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal.77

pembangunan lain. Senada dengan pengertian ini Priyono dan Pranaka menyatakan bahwa ; pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to oreneble*.

Pemaknaan pengertian yang pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Keberdayaan menurut Adjid adalah kondisi dinamik yang merefleksikan kemampuan suatu sistem sosial dalam mewujudkan tujuan atau nilai-nilai yang diacunya (diidamkannya).

Maka dari itu pemberdayaan berarti usaha (program, proses) untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuan secara mandiri. Proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri.¹⁹ Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat, kedua unsur tersebut tidak bisadipisahkan.²⁰

Kadarisman menyatakan pemberdayaan adalah merupakan suatu

¹⁹ Sumaryo Gitosaputro dan Kordiyana K.Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal.28-29

²⁰ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal.88

proses untuk menjadikan orang lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan yang diharapkan akan menumbuhkanrasatangjawab.²¹ Pada prinsipnya pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar akulturasi diri.

Sumodiningrat, berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur,yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*); (2) Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*); (3) Memberikan perlindungan (*Protecting*). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan.²² Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam hal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²³

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan

²¹ M.Chazienul Ulum, *Perilaku Organisasi: Menuju Orientasi Pemberdayaan*. (Malang: UB Press, 2016), hal.140

²²Bambang Supriyono, et.all., *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)*Jurnal Administrasi Publik, Vol. I No.4, hal. 10-11

²³ Wisnu Indrajit dan Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. (Malang: Intrans Publishing, 2014), hal.81

masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Bertolak ada pendapat ini, berarti pemberdayaan tak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.²⁴

Dari pernyataan para ahli mengenai pemberdayaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah pemberian daya atau kekuatan dari pihak yang mempunyai kekuatan kepada pihak yang tidak berdaya/ belum berdaya agar pihak yang belum berdaya dapat menangani masalahnya sendiri seperti masalah kemiskinan dan ekonomi yang nantinya orang tersebut dapat mencapai kemandirian dalam segala hal baik ekonomi maupun lainnya. Dari berbagai tulisan Sumodiningrat, konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warganegara.

²⁴ Sulistiyani, *Kemitraan...*, hal.79

- b) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
- d) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- e) Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi

transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukansekadarprice taker; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasil

- f) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakatlokal

Terdapat enam faktor utama hambatan dalam inovasi pemberdayaan, yaitu pertama kurang tepatnya perencanaan atau estimasi dalam proses difusi inovasi, kedua adanya konflik dan motivasi, disebabkan karena adanya masalah-masalah pribadi seperti pertentangan antar anggota tim pelaksana, kurang motivasi untuk bekerja dan berbagai macam sikap pribadi yang mengganggu kelancaran proses inovasi, ketiga inovasi tidak berkembang, keempat, masalah finansial, kelima penolakan kelompok tertentu dan keenam kurang adanya hubungan sosial.²⁵

Sedangkan pengertian masyarakat sendiri menurut Gillin dan Gilling adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang diikat oleh kesamaan agama, yakni

²⁵ Ibrahim, *Inovasi Pendidikan*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan P2LPTK, 1998), hal. 122

agama Islam.²⁶ Pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan leksikal berarti penguatan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan dalam pengertian lain, pemberdayaan adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat ini berarti masyarakat di berdayakan untuk memilih suatu yang bermanfaat bagi dirinya.²⁷

3. Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM)

Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) adalah program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Timur. Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) dalam tujuannya membidik perekonomian rumah tangga yang masuk kedalam Desil 1 dapat di klasifikasikan sebagai rumah tangga miskin dan sangat miskin kelompok rumah tangga sangat miskin ini relative belum pernah mencapai target spesifik prioritas berbagai penanggulangan kemiskinan secara eksklusif. Program Jalin Kesra yang di laksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Mulai Tahun 2010-2013. Untuk kelanjutan penanganan sisa layak eksekusi tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun kemitraan kerja dengan pemerintah Kabupaten di Jawa Timur dengan beberapa perubahan dan perbaikan pengelolaan di tetapkan program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin. Program Jalin

²⁶ Only S. Prijiono dan A.M. W Pranaka, *Mengenai Pemberdayaan: konsep, kebijakan dan implementas*. (CSIS:Jakarta, 1996), hal. 48

²⁷ Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Dafe'I, *Pengembangan Masyarakat Islam*. (Bandung: PT. Remaja rosdakarya, 2001), hal. 41-42

Matra BRTSM ini direncanakan pelaksanaannya mulai Tahun 2014-2018 dengan sasaran kepada tangga sangat miskin dengan status kesejahteraan 5% terendah.²⁸

Prinsip dalam pelaksanaan Program bantuan BRTSM yaitu yang pertama kepedulian sosial Jalin Matra Bantuan RTSM pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin agar memiliki daya tahan hidup. Sehingga negara berkewajiban mendorong Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pemerintah Desa dan masyarakatnya melakukan kepedulian sosial. Jalin Matra Bantuan RTSM dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial.

Kedua yakni partisipatoris. Kegiatan Jalin Matra Bantuan RTSM dilaksanakan dengan membuka ruang publik, partisipasi aktif Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam *Rembug Warga/Udhar Gelung*. Yang ketiga Transparan dan Akuntabel, Pelaksanaan Program Jalin Matra Bantuan RTSM secara terbuka dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat maupun publik yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bagi publik memberikan kritik konstruktif dan atau masukan

²⁸ bapemas.jatimprov.go.id/programunggulan/brtsm diakses tanggal 10 Juni 2020

perbaikan pelaksanaan program. Yang keempat keterpaduan Pelaksanaan Jalin Matra Bantuan RTSM melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perguruan Tinggi, tenaga pendamping, swasta dan masyarakat, yang memiliki kepedulian terhadap orang miskin serta bekerja secara sinergis dan terpadu. Dan yang terakhir Keberlanjutan (*Sustainability*) Jalin Matra Bantuan RTSM pada dasarnya merupakan stimulan bagi bertumbuhnya dan berkembangnya kondisi ekonomi dan sosial RTSM. Selanjutnya pemerintah Desa berkewajiban dalam membina RTSM untuk mengembangkan bantuan yang telah diterima secara berkelanjutan.²⁹

Adapun maksud dan tujuan dari Jalin Matra BRTSM ini secara umum adalah sebagai salah satu bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, sedangkan secara khusus tujuan jalin matra BRTSM adalah : Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin melalui optimalisasi peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). Memperluas akses Rumah Tangga Sangat Miskin terhadap usaha produktif untuk peningkatan aset usaha/ pendapatankeluarga. Membantu meningkatkan ketahanan sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar; Mendorong motivasi berusaha (*Need for*

²⁹ Pedoman umum program JALIN MATRA Bantuan RTSM tahun 2017, hal. 9-11

Achievement) dan kemampuan (*Life Skill*) RTS dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.³⁰

Anggaran bantuan RTSM yakni Anggaran Jalin Matra Bantuan RTSM bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dihitung berdasarkan jumlah RTSM dikalikan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah Biaya Operasional tingkat Desa dan Honor Pendamping Desa. Bantuan kepada RTSM melalui Pemerintah Desa dapat digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan RTSM, yang pemanfaatannya adalah untuk:

modal investasi dalam bentuk sarana prasarana, modal usaha dan untuk kegiatan usaha pendukung. Adapun bentuk kegiatannya sebagai berikut:

- a) Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif meliputi Modal Investasi berupa sarana prasarana usaha dan Modal Kerja minimal 70%;
- b) Kegiatan Usaha pendukung misalnya Pertanian Karangkitri (Rumah Pangan Lestari), Usaha ternak Kecil dan Perikanan maksimal 30%;
- c) Dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar

³⁰Pedoman umum program JALIN MATRA Bantuan RTSM tahun 201, hal. 8

maksimal 10%.

4. Kemiskinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Kemiskinan adalah berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta, kekurangan (berpenghasilan rendah) lalu kemiskinan itu sendiri adalah keadaan miskin. Jadi dapat diartikan kemiskinan merupakan suatu keadaan seseorang atau kelompok dalam kekurangan/penghasilan rendah.³¹ Kemiskinan menurut Emil Salim merupakan suatu situasi atau keadaan dimana manusia atau penduduk tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Dan mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok. Kebutuhan yang paling pokok semisal makanan, pakaian, perumahan danlain-lain.³²

Sedangkan menurut Andre Bayo Ala,³³ terdapat beberapa aspek kemiskinan yaitu:

- a) Bahwa kemiskinan sifatnya multidimensional karena menyangkut karakter manusia yang memerlukanberbagaijenis kebutuhan dan terkait dengan berbagai dimensi kehidupan. Kemiskinan meliputi aspek primer yaitu miskin asset, organisasi sosial politik dan pendidikan dan keterampilan. Dan juga aspek sekunder yaitu

³¹ kbbi.web.id/kemiskinan diakses tanggal 10 Juli 2020

³² Junaidin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hal. 94

³³ Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Indonesia: Masalah dan Implementasi Kebijakan*. (Yogyakarta:UPFE-UMY, 2007), hal. 34

miskin jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Kemiskinan juga menyangkut berbagai dimensi diantaranya berupa kekurangan protein dan kalori, sarana perumahan yang tidak sehat, pendidikan yang tidak memenuhi standar kualitas dan fasilitas kesehatan yang terbatas.

- b) Aspek-aspek kemiskinan yang saling berkaitan yang berarti bahwa persoalan kemiskinan menyangkut dimensi kehidupan individu dan sosial, ekonomi dan non-ekonomi yang saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c) Kemiskinan menyangkut nasib kehidupan manusia yang berarti bahwa persoalan kemiskinan tergantung bagaimana manusia mensikapinya. Jadi kebijakan pengentasan kemiskinan harus berorientasi pada upaya merubah pola pikir dan perilaku masyarakatnya agar terlepas dari jerat kemiskinan.

Konsep kemiskinan bersifat multidimensional, oleh karena itu cara pandang yang dipergunakan untuk memecahkan persoalan kemiskinan hendaknya juga meliputi beberapa aspek dari kemiskinan. Dilihat dari sisi *poverty profile* masyarakat, menurut Tjokrowinoto, kemiskinan tidak hanya sekedar menyangkut persoalan kesejahteraan (*welfare*) saja, tetapi kemiskinan juga menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), akses kepada

berbagai peluang kerja yang sulit, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, tingkat ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kemiskinan acap kali terkait dengan kerentanan. Orang miskin biasanya sekaligus berada pada kondisi yang rentan, atau lemah. Orang miskin tidak memiliki daya kemampuan yang cukup di banyak bidang. Secara eksplisit dapat diketahui bahwa orang miskin secara ekonomi, dibarengi oleh rendahnya pendidikan, sedikit wawasan, tidak berdaya dan tidak memiliki kekuasaan. Lemahnya sistem pertahanan ekonomi telah mempengaruhi ketahanan di banyak bidang. Dengan demikian jika mendapatkan tekanan kondisi sedikit saja, sudah mengalami kesulitan dan juga jatuh. Kemiskinan juga dibarengi oleh ketidakberdayaan. Orang miskin tidak memiliki daya atau kemampuan yang cukup. Biasanya tidak berdaya secara ekonomi, pendidikan, politik, sosial maupun kekuasaan. Ketidakberdayaan ekonomi disebabkan oleh terbatasnya akses produksi, alat produksi, kegiatan pelayanan jasa, dan lain-lain.

Kalaupun masyarakat miskin terlibat dalam kegiatan produksi, pelayanan jasa, dan aktivitas ekonomi lainnya, biasanya hanya dalam komoditas yang rendah nilainya, dengan perputaran waktu yang lambat, sehingga sangat sedikit keuntungan yang didapat. Penghasilan yang

diperoleh hanya cukup untuk konsumsi, dan tidak melakukan tabungan atau membangun permodalan dari komoditas yangdiusahakannya.

Chambers menyatakan bahwa masyarakat miskin ialah kelompok warga yang kurang beruntung. Berikut kriteria sebagai tolak ukur yang bersifat kualitatif atas ketidakberuntungan tersebut dengan beberapa ciri berikut ini.³⁴

- a) Rumah tangga miskin hanya memiliki sedikit sekali harta kekayaan atau bahkan tidak punya sama sekali. Tempat tinggalnya berukuran sempit yang terbuat dari bambu, kayu, tanah liat dan perabotan yang dimiliki hanya sedikit. Rumah tangga miskin ada juga yang mempunyai rumah berdinding tembok dan berlantai keramik, hanya saja itu berkat jerih payah anggota keluarga yang sebagai tenaga migran di luar negeri. Rumahnya sering tidak mempunyai fasilitas mandi, cuci dan kakus. Kondisi ekonomi sehari-hari rumah tangga ini rapuh bahkan untuk kebutuhan pokok setiap hari mengalami kesulitan. Produktivitas tenaga kerja rendah dan sumber pendapatan utama tertumpu pada kiriman uang dari luar negeri yang tidak terjadwal. Pola nafkah cenderung bertani pada lahan yang sempit.
- b) Rumah tangga miskin lemah jasmani. Beban tanggungan ekonomi yang harus dipikul kepala rumah tangga miskin

³⁴ Imam Santosa, *Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014), hal.18-22

cukup berat. Kebutuhan biaya kesehatan terabaikan karena mementingkan biaya kebutuhan pokok serta pola makan dengan status gizi yang rendah menyebabkan kondisi jasmani anggota rumah tangga miskin menjadi menderita giziburuk.

- c) Rumah tangga miskin tersisih dari arus kehidupan. Rumah tangga miskin di pedesaan pada umumnya bertempat tinggal di lokasi pinggiran dan terpencil jauh dari keramaian dan pusat informasi. Begitu juga di perkotaan, warga miskin menempati rumah tinggal yang berada di pemukiman padat yang dihmpit oleh gedung/toko, tepian sungai, sekitarn stasiun kereta api atau terminal bus. Akses terhadap fasilitas pendidikan rendah yang menyebabkan mereka putus sekolah. Warga miskin ini jarang bersedia aktif berpartisipasi dalam ragam pertemuan, rapat maupun kegiatan sosial formal/non formal.
- d) Rumah tangga miskin yang rentan. Rumah tangga miskin hanya mempunyai penyangga yang lemah untuk menghadapi berbagai kebutuhan yang mendesak. Rumah tangga miskin tidak berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat miskin tidak terlepas dari tekanan internal dan eksternal sistem sosial di lingkungan masyarakat sekitarnya. Akses kesempatan untuk mendapat pekerjaan, pendidikan, kesehatan, komunikasi, teknologi tergolong relatif rendah. Persaingan ketat harus

dihadapi untuk mendapatkan pekerjaan produktif.

Kemiskinan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis sesuai sudut pandang yang digunakan. Menurut Sumodiningrat kemiskinan dibagi menjadi lima jenis, adalah sebagai berikut.³⁵

a) Kemiskinan Absolut

Menunjukkan keadaan seseorang atau sekelompok masyarakat yang taraf hidupnya (pendapatan) begitu rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.³⁶

b) Kemiskinan Relatif

Jenis kemiskinan ini dicirikan bila pendapatan diperoleh seseorang atau rumah tangga berada di atas garis kemiskinan namun relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat pendapatan masyarakat sekitarnya.

c) Kemiskinan Kultural

Pada kemiskinan kultural terdapat sikap dan perilaku seseorang atau rumah tangga yang tidak mau bersedia bekerja secara produktif untuk perbaikan mutu kehidupan disebabkan tekanan faktor budaya.

d) Kemiskinan Kronis

Kemiskinan kronis terjadi apabila pengaruh beberapa faktor bekerja secara simultan. Berbagai faktor yang sering menyebabkan kemiskinan kronis dapat bersifat internal dan

³⁵Imam Santosa, *Pengembangan Masyarakat...*, hal. 27-28

³⁶T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004), hal. 326.

eksternal. Faktor internal meliputi : sumber daya terbatas, tingkat produksi rendah, budaya menyebabkan perilaku kurang produktif, pendapatan rendah, tunakarya, tingkat pendidikan rendah dan lain-lain. Adapun faktor eksternal meliputi lapangan pekerjaan terbatas, fasilitas informasi jaringan kerja belum memadai, penetrasi pasar kuat, daya saing pelaku ekonomi luar sistem sosial lebih kuat dan kebijakan yang kurang berpihak pada kepentingan wargamiskin.

e) Kemiskinan Sementara

Jenis kemiskinan sementara terjadi karena siklus ekonomi terganggu oleh berbagai faktor yang mampu mengalihkan kondisi normal ke kondisi tertentu dengan indikasi kemunculan krisis. Masyarakat dimungkinkan terkena kemiskinan sementara ketika menghadapi bencana alam.

5. Perubahan Ekonomi

Perubahan ekonomi sendiri merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sadono Sukirno,

pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.³⁷

Perkembangan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari daerah di sekitarnya, wilayah sebagai subsistem spasial dalam lingkup yang lebih luas. Sebuah kabupaten atau kota yang bersangkutan, juga perlu memperhatikan paling tidak bagaimana perkembangan daerah di sekitarnya (*interregional planning*).³⁸ Perkembangan ekonomi (*development*) berawal pada suatu lingkungan sosial, politik dan teknologi yang menunjang kreativitas para wiraswasta. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya (Kuznet). Ekonom klasik mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu 1). Jumlah penduduk, 2) jumlah stok barang dan modal, 3) luas tanah dan kekayaan alam, 4) tingkat teknologi yang digunakan.³⁹

6. Peluang Usaha

Dalam peluang usaha sendiri merupakan sebuah kesempatan yang akan didapatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan dengan cara melakukan sebuah usaha yang akan memanfaatkan berbagai macam

³⁷Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 45

³⁸Sumarmi dan Amirudin, *Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)* Jurnal UM, April 2015

³⁹Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Erlangga, 2004), hal

sumber daya yang akan dimiliki. Dalam hal ini peluang usaha menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan sebelum membuka sebuah usaha.

Menurut Robbin dan Coulter, peluang usaha diartikan sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tambah guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan.⁴⁰ Sedangkan menurut Thomas W. Zimmerer peluang usaha berarti adanya penerapan sebuah kreatifitas dan inovasi. Ini dilakukan dari hasil pemikiran yang digunakan untuk memecahkan permasalahan kehidupan sehingga muncul kesempatan untuk bisa dimanfaatkan.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi telah banyak dilakukan oleh para akademisi, dan telah dipublikasi secara umum baik dalam bentuk jurnal, skripsi maupun tesis. Karya-karya tersebut telah dihasilkan oleh para peneliti adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Nada,⁴² judul penelitian “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Jalan Lain Menuju Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera (Jalin Matra) Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin Di Kabupaten Tulungagung”

⁴⁰Stephen Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen*. (Jakarta: PT Indeks, 2007), hal. 24

⁴¹Thomas W Zimmerer, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. (Jakarta: Salemba Empat, 2008)

⁴²Inda Ni'matun Nada, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Jalan Lain Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin Di Kabupaten Tulungagung*, Skripsi: IAIN Tulungagung, diakses tanggal 2 Desember 2019

dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilatar belakangi oleh program yang dilakukan pemerintah Jawa Timur mengenai pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian dan mengatasi masalah kemiskinan yang ada di wilayah Jawa Timur melalui program Jalin Matra yang dalam ini adalah Jalin Matra BRTSM (Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin). Dengan hasil menunjukkan bahwa Jalin Matra BRTSM memberikan pemberdayaan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga miskin dengan bantuan berbentuk barang untuk mengembangkan usaha kepada RTSM yang dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kendala di lapangan dana yang diberikan satu kali saja. Solusinya dana yang harus diberikan harus dilaksanakan dengan baik.

Husna,⁴³ dengan judul penelitian “Efektifitas Program Jalin Matra Terhadap Kesejahteraan Janda Miskin Desa Sumberejo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar Ditinjau Dari Ekonomi Islam” dengan menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif karena objek yang diteliti berlangsung dalam keadaan latar yang alami. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi lapangan, yang bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi, baik berupa wawancara, observasi dan telaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah 36 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP)

⁴³ Dina Asmaul Husna, Efektifitas Program Jalin Matra Terhadap Kesejahteraan Janda Miskin Desa Sumberejo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar Ditinjau Dari Ekonomi Islam, *Jurnal: Martabat: Perempuan dan Anak*, Fakultas Syariah IAIN Kediri, diakses tanggal 27 Juli 2020.

atau janda miskin yang ada di Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yang memuat gambaran, sistematis dan analisis dilakukan dengan 3 cara yaitu: Reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan adanya efektifitas program Jalin Matra terhadap kesejahteraan janda miskin Desa Sumberejo. Meskipun ada juga kendala yang membuat tidak meratanya bantuan.

Mufidah,⁴⁴ dengan judul penelitian “Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera (JALIN MATRA) Dalam Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Di Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”. Adapun teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive dengan total informan sebanyak 16 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya semangat dari masyarakat desa Domas, melihat dari mereka menggunakan bantuan tersebut sebagai modal usaha. Meskipun dalam pencariannya ada juga kendalanya.

Solusinya dibutuhkan tim pengawasan dalam implimentasi bantuan Jalin Matra, agar tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana proses implementasi pada Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) dalam Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

⁴⁴ Shabrina Mufidah, Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera (JALIN MATRA) Dalam Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Di Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, *Jurnal: Mahasiswa Program Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga*, diakses tanggal 20 April 2020.

kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan teknik observasi, wawancara, dokumentasi penelitian. Hasil temuan data yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada program pada Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) dalam Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sudah berhasil dibuktikan adanya peraturan yang cukup jelas, partisipasi masyarakat sangat aktif serta dapat meningkatkan perekonomian RTS penerima sebelum 4,18% dan sesudah mendapat bantuan menjadi 5,18% sudah terlihat meskipun tidak banyak peningkatan penghasilan yang diperoleh. Namun, masih ada kecemburuan sosial yang terjadi dimasyarakat.

Shinta⁴⁵ dengan judul penelitian “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Studi Kasus Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi kemiskinan khususnya pada desa yang berada di Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang tujuannya dapat menjadikan KRTP mandiri setelah diberdayakan dan dapat mengembangkan usaha produktifnya sehingga mampu mensejahterakan

⁴⁵ Dewinda Clara Shinta, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Studi Kasus Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Sosiologi, diakses tanggal 21 April 2020

hidupnya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yakni: Pertama, bagaimana bagaimana proses pemberdayaan perempuan pada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dalam program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan. Kedua, bagaimana perubahan yang dialami Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dengan cara melihat langsung masalah yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Kendala yang terjadi adalah kesalah fahaman masyarakat dan pemerintah desa dan solusinya yaitu para penerima dan pemerintah desa harus aktif menyalurkan informasi agar tidak terjadi kesalah fahaman.

Novitasari dan Meirinawati,⁴⁶ dengan judul penelitian “Manajemen Strategi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) melalui Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Di Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk mengamati dan mendeskripsikan Manajemen Strategi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera melalui Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Di Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan

⁴⁶ Ni Nyoman Putri Novitasari dan Meirinawati, Manajemen Strategi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) melalui Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Di Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, *Jurnal: SI Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*, Vol 7, No 1 (2019), diakses tanggal 22 April 2020.

kesimpulan. Dibutuhkan strategi yang matang dalam pengelolaan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) agar tepat sasaran. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, dalam manajemen strategi program Jalin Matraini menentukan aktivitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Dapat dilihat tujuan dari program Jalin Matra PK2 untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Dimana masyarakat yang berada pada kategori desil 2 dan desil 3 mendapat bantuan, sehingga dapat memperbaiki perekonomiannya.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, sebagai berikut.

Tabel 2.1
 Persamaan dan Perbedaan
 Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian Sekarang

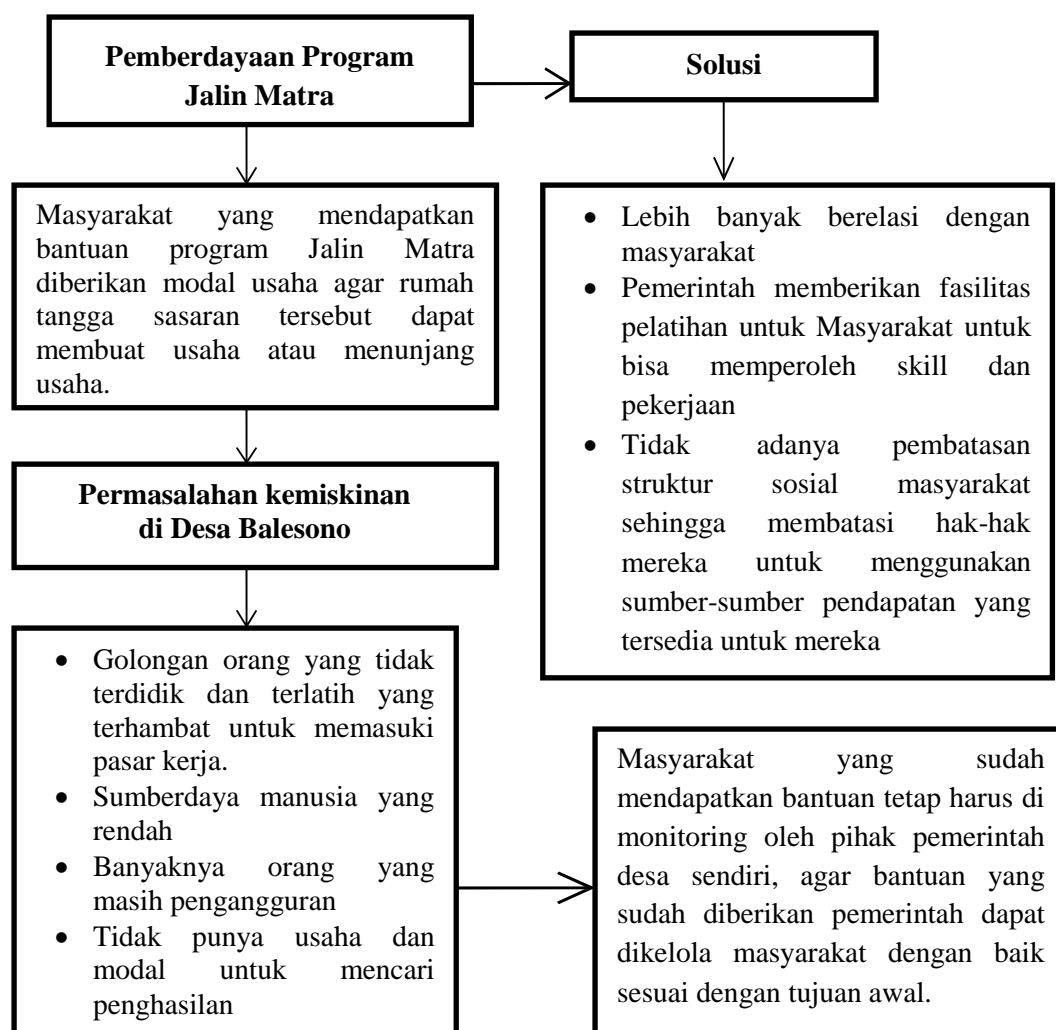
No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	“Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Jalan Lain Menuju Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera (Jalin Matra) Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin Di Kabupaten Tulungagung”, tahun 2019, oleh Inda Ni’matunNada	<ul style="list-style-type: none"> - Topik yang diteliti yaitu tentang program Jalin Matra terkait BRTSM - Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut - Penelitian menekankan pemberdayaan masyarakat dari bantuan Jalin Matra BRTSM
2.	“Efektifitas Program Jalin Matra Terhadap Kesejahteraan Janda Miskin Desa Sumberejo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, oleh Dina Asmahul Husna	<ul style="list-style-type: none"> - Topik yang diteliti yaitu tentang program Jalin Matra terhadap kesejahteraan janda miskin atau PFK - Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian di Desa Sumberejo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar - Titik tekan penelitian ini terdapat pada perilaku penerima bantuan program Jalin Matra PFK dimana fokus terhadap kesejahteraan janda miskin
3.	“Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera (JALIN MATRA) Dalam Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Di Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”, tahun 2018, oleh Shabrina Mufidah	<ul style="list-style-type: none"> - Topik yang diteliti yaitu tentang program Jalin Matra - Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian di Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik - Fokus penelitian ini yaitu tentang program Jalin Matra yang terkait dengan PK2
4.	“Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Studi Kasus Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)”, tahun 2019, oleh Dewinda Clara Shinta	<ul style="list-style-type: none"> - Topik yang diteliti yaitu tentang program Jalin Matra - Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo - Fokus penelitian ini yaitu program Jalin Matra terkait Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK)

5.	<p>“Manajemen Strategi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) melalui penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang”, tahun 2019, oleh Ni Nyoman Putri Novitasari dan Meirinawati</p>	<p>- Topik yang diteliti yaitu tentang program Jalin Matra - Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan Deskriptif</p>	<p>- Lokasi penelitian di Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang - Penelitian membahas bantuan Jalin Matra berfokus ke manajemen strategi JalinMatra PK2</p>
----	---	---	--

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung



Keterangan:

Dari kerangka konseptual di atas, Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung mendapatkan program bantuan dari pemerintah Jawa Timur dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Bantuan sendiri diberikan oleh pemerintah karena adanya permasalahan kemiskinan. Banyak faktor yang menyebabkan permasalahan kemiskinan, dilihat dari tabel di atas salah satunya yaitu banyaknya masyarakat yang masih menjadi pengangguran. Dari permasalahan kemiskinan yang terdapat di Desa Balesono, pemerintah desa memberikan fasilitas pelatihan untuk masyarakat agar bisa memperoleh *skill* dan pekerjaan.

Untuk itu, pemberdayaan yang sudah dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi masalah kemiskinan di Desa Balesono, yaitu dengan memberikan bantuan program Jalin Matra berupa penunjang usaha untuk rumah tangga sasaran. Agar kedepannya bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dalam waktu jangka panjang, akan tetapi dari bantuan tersebut dibutuhkan solusi agar dapat dikelola dengan baik. Yaitu Masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan tetap harus di *monitoring* oleh pihak pemerintah desa sendiri, sehingga bantuan yang sudah diberikan pemerintah dapat dikelola masyarakat dengan baik sesuai dengan tujuan awal.